

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
28/PUU-XI/2013 TENTANG UJI MATERI ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN**

**OKTO BERLIN GULTOM**

***ABSTRACT***

*Cooperative Law No. 17/2012 is the last law on cooperative legalized by the Legislative Assembly. The law is legalized on 30 October 2012 as the Substitute of Cooperative Law No.25/1992. Cooperative Law No. 17/2012 is reviewed judicially by six cooperatives and two individuals. Judge of the Constitutional Court in the decision stated Cooperative Law No.17 is invalid. Due to the decision, Cooperative Law No. 25/1992 is valid as Cooperative Law for temporary until a new cooperative law is legalized.*

*By the cancelation of Cooperative Law No. 17/2012, the law cannot be used as the basis of cooperative in Indonesia. The status of the cooperative management that are not from the cooperative members after the decision of Constitutional Court No. 28/PUU-XI/2013 do not have the right to be the cooperative management because the Cooperative Law No. 25/1992 that becomes the temporary Cooperative Law states that management can be choosen from the cooperative members.*

*Government should really make a cooperative regulation for the improvement of cooperative and not only for the interest of government. Cooperative members should be the pole to improve the potentials possessed so that cooperative members that will become the management improve the cooperative in the future.*

***Keywords: Judicial Analysis, Decision of Constitutional Court, Cooperative***

**I. Pendahuluan**

Masalah koperasi merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah karena koperasi merupakan bagian dari tata perekonomian masyarakat Indonesia. Koperasi dikenal di Indonesia pada tahun 1896 dari seorang Patih Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atmadja di Purwekerto yang merintis mendirikan suatu Bank Simpanan (*Hulp Spaarbank*) untuk menolong para pegawai negeri (kaum Priyayi) yang terjerat tindakan dalam soal riba dari kaum lintah darat.

Kegiatan perekonomian yang didasarkan hubungan kerjasama semakin gencar disuarakan oleh pemerintah di era kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Berdasarkan Pasal 33 ayat 1 tersebut, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuh-kembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Pada tanggal 30 Oktober 2012 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini memberikan perubahan koperasi kearah yang lebih modern, yakni koperasi tidak berfokus kepada anggota, tetapi berfokus kepada modal yang tidak lain dan tidak bukan merupakan konsep perseroan terbatas.<sup>1</sup> Struktur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan struktur pengaturan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).

Perubahan koperasi kearah modern yang diharapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian mendapat banyak kritik dari khalayak umum. Kritik-kritik tersebut berlanjut dengan diajukannya *judicial review* (uji materi) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>1</sup> [Apriliazala.blogspot.com/2014/06/kenapa-undang-undang-koperasi.html?m=1](http://Apriliazala.blogspot.com/2014/06/kenapa-undang-undang-koperasi.html?m=1), Aprilia Eka Putri, Alasan Undang-Undang Koperasi Dibatalkan, diakses pada tanggal 02 Maret 2015

Adapun pemohon yang mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono, kesemuanya diwakili oleh Aan Eko Widiarto, Iwan Permadi, Haru Permadi, Konsultan Hukum Universitas Brawijaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2013.<sup>2</sup>

Alasan-alasan pemohon mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah:<sup>3</sup>

- a. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perkoperasian menghalangi hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam wadah koperasi. Dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perkoperasian yang menentukan bahwa koperasi didirikan oleh perseorangan berakibat pada pengutamaan kemakmuran orang-seorang, bukan kemakmuran anggota. Selain itu, dengan definisi koperasi yang didirikan oleh perseorangan, maka prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan tidak dapat terwujud. Seharusnya maksud asas kekeluargaan dalam menyelenggarakan kegiatan perekonomian adalah adanya ide tanggung jawab bersama untuk menjamin kemajuan bagi semua orang. Tujuan memajukan usaha bersama bukannya keuntungan pribadi, tetapi kemajuan bagi seluruh anggota koperasi. Istilah berdasarkan atas asas kekeluargaan menunjukkan adanya landasan bagi tanggung jawab bersama yang ditujukan untuk mencapai usah bersama yang akan menjamin bagi setiap anggota. Sifat kolektifitas inilah perbedaan antara sistem ekonomi yang dicita-citakan yaitu asas kekeluargaan dengan sistem ekonomi yang mendasar pada asas individualisme. Kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan seharusnya tidak lagi mengandalkan motif keuntungan pribadi, tetapi motif untuk mensejahterakan kehidupan semua anggota koperasi demi kebaikan bersama.

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diunduh dari laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diunduh dari laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

- b. Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian menghalangi hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk melakukan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam wadah koperasi.

Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) pada intinya menetapkan bahwa pengurus dan pengawas koperasi digaji dan mendapat tunjangan. Menurut M. Fathorrazi bahwa ada dua tipe koperasi, yakni ala Herman SD yang pengurusnya digaji dan koperasi ala Raiffeisen yang pengurusnya tidak digaji. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka membelenggu hak para pemohon untuk menjalankan koperasi ala kedua (koperasi Raiffeisen) yakni koperasi yang pengurusnya tidak digaji. Pembentuk Undang-Undang memaksakan satu bentuk koperasi saja yaitu koperasi yang pengurus koperasi digaji. Apabila dikaji lebih lanjut koperasi tipe kedua merupakan ide tipe yang sangat ideal karena pengurus yang tidak digaji pantas terjadi sebab pengurus tidak harus full time/mengurus koperasi karena pengurus dapat mengangkat pengelola koperasi. Hal ini dengan pendapat Bung Hatta menyatakan bahwa pada umumnya pengurus koperasi tidak digaji. Hanya pejabat dan pekerja penuh sehari-hari yang digaji.

- c. Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian menghalangi hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua pasal tersebut intinya memberikan wewenang pengawas sangat besar yang melebihi wewenang rapat anggota sebagai perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Wewenang pengawas yang lebih tersebut meliputi:

- 1) Mengusulkan calon pengurus (Pasal 50 ayat (1) huruf a);
- 2) Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar (Pasal 50 ayat (2) huruf a)
- 3) Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya (Pasal 50 ayat (2) huruf a); dan
- 4) Mengusulkan gaji dan tunjangan setiap pengurus (Pasal 57 ayat (2)).

Ketentuan yang demikian tersebut akan mengakibatkan kerugian para pemohon untuk menjalankan organisasi koperasi tanpa ada *check and balances system*. Demokrasi dalam koperasi menjadi hilang, padahal demokrasi merupakan salah satu prinsip koperasi. Hal ini disebabkan wewenang pengawas sangat dominan bahkan melebihi rapat anggota sebagai wujud kedaulatan anggota. Selama ini pencalonan pengurus, pemberhentian anggota dan pemberhentian pengurus menjadi wewenang rapat anggota. Adapun pengusulan gaji dan tunjangan tidak pernah dilakukan karena pengurus tidak digaji. Akibatnya, hubungan antara pengawas dengan perangkat koperasi yang lain (pengurus) menjadi tidak setara, bahkan melebihi wewenang rapat anggota. Dengan demikian

koperasi lama kelamaan akan mati karena konflik internal akibatnya besarnya wewenang pengawas dan ini mengakibatkan hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- d. Bab VII Undang-Undang Perkoperasian meniadakan hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan ketentuan permodalan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Bab VII Undang-Undang Perkoperasian, para Pemohon tersebut dirugikan karena dalam menjalankan koperasinya tidak lagi dapat mendasarkan pada asas kekeluargaannya. Koperasi nantinya dijalankan dengan prinsip sebatas modal yang dikeluarkan. Unsur-unsur persaudaraan dalam asas kekeluargaan tidak mungkin terwujud. Perlakuan yang tidak adil pun nantinya akan terjadi dengan munculnya anggota pemegang “mayoritas” Sertifikat Modal Koperasi” dengan “minoritas” layaknya Perseroan Terbatas. Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut juga telah menimbulkan kekhawatiran, kecemasan terhadap para Pemohon dalam rangka memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesenjangan sosial, yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pengaturan modal koperasi juga merugikan karena membuka peluang intervensi pihak luar/non-anggota, termasuk Pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan. Modal koperasi ditetapkan berasal dari setoran pokok dan setoran modal koperasi, hibah, termasuk dari pihak asing, modal penyertaan, modal pinjaman, dan sumber lain. Tidak ada pembatasan proposisi dana dari pihak luar dan ketentuan yang menjamin otonomi koperasi. Skema seperti ini jelas akan mematikan koperasi.

- e. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian mengurangi hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 78 ayat (2) memberikan larangan bagi koperasi untuk membagikan surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dari non anggota koperasi kepada anggota. Ketentuan tersebut jelas merugikan anggota. Pembagian surplus sisa hasil usaha sesungguhnya merupakan hak anggota dan juga merupakan salah satu konsekuensi dianutnya prinsip usaha bersama dengan asas kekeluargaan agar koperasi tetap hidup dan berkembang. Koperasi pada dasarnya memang diselenggarakan untuk mewujudkan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Terwujudnya kesejahteraan bagi anggota koperasi salah satunya adalah dengan pembagian hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi. Usaha yang dilakukan oleh koperasi salah satunya adalah penyediaan barang atau jasa kepada masyarakat secara luas (bukan hanya anggota koperasi). Oleh karena pada dasarnya usaha dilakukan oleh koperasi yang diselenggarakan

pula oleh anggota, maka pada dasarnya anggota koperasi berhak untuk menerima hasil usaha tersebut.

- f. Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Perkoperasian menghalangi hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketiga pasal tersebut membatasi usaha koperasi dengan menentukan satu koperasi satu jenis usaha. Dengan demikian memunculkan berbagai kerancuan dan kerugian bagi koperasi-koperasi yang telah berjalan. Koperasi yang ada pada saat ini akan dirombak menurut jenis koperasi dan jenis usahanya. Hal ini akan mengakibatkan kepengurusan harus dipecah, AD/ART diubah, aset dipecah, usaha dipecah, dan seterusnya. Koperasi akan sibuk dengan masalah “pemecahan” tersebut bukan usahanya. Hal ini akan mengakibatkan biaya tinggi, risiko konflik internal, dan yang paling mendasar adalah bahwa selama ini koperasi hidupnya saling menopang antara jenis-jenis usaha yang dilakukan, misalnya ada koperasi yang punya usaha jasa perdagangan, pendapatannya ditopang oleh usaha simpan pinjam sehingga kalau nantinya harus dipecah maka tidak bisa terjadi mutualisme namun yang terjadi adalah matinya usaha koperasi tersebut. Anggota jelas akan dirugikan karena kebutuhan anggota tidak dapat terpenuhi akibat koperasi hanya mengoperasikan satu jenis usaha saja. Selain itu, mengingat untuk menyusun usaha dengan segala investasi yang telah dikeluarkan dan tata kelola yang telah disistemkan bukanlah pekerjaan main-main dan memiliki dampak yang sangat besar bagi anggota dengan semua kebutuhannya yang coba difasilitasi oleh koperasi. Dampaknya, koperasi yang memiliki berbagai jenis usaha (KUD, KPRI, KOPWAN, KOPKAR) dengan seluruh unit yang dimiliki untuk memenuhi semua kepentingan ekonomi anggota harus dibekukan dan diganti dengan jenis koperasi yang dipaksakan ketentuan ini. Heterogenitas kepentingan ekonomi anggota yang coba difasilitasi koperasi tersebut (termasuk unit simpan pinjam) akan hilang.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Memutus perkara uji

materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terhadap

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 khususnya frase “orang-perseorangan” bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena definisi koperasi yang menekankan bahwa koperasi didirikan oleh orang perseorangan bertentangan dengan asas kekeluargaan dan koperasi akan bersifat individualisme (mendahulukan kepentingan sendiri) bukan “individualitas” yang bermakna insaf akan harga dirinya serta mengingkari prinsip koperasi yang sejati yaitu usaha bersama (*on cooperative basis*);

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.212

2. Pasal 37 ayat (1) huruf f dan pasal 57 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena dengan menetapkan bahwa pengurus dan pengawas koperasi digaji dan mendapat tunjangan maka ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang bentuk perusahaannya adalah koperasi;
3. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak memberi kesempatan pada setiap anggota untuk bisa memilih dan dipilih sebagai pengurus secara langsung dalam rapat anggota, namun harus melalui satu pintu pengusulan yaitu oleh pengawas;
4. Bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena asas kekeluargaan sebagai landasan usaha bersama yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah menghendaki hubungan antara anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan sebagai orang-orang yang bersaudara, satu keluarga. Dengan dipilihnya non anggota sebagai pengurus koperasi maka dasar kolektivitas dalam koperasi menjadi hilang. Hal itu jelas bertentangan dengan jiwa koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan, saling tolong menolong, gotong royong, senasib sepenanggungan, bersama-sama menolong dirinya dan berdiri di kaki sendiri.
5. Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena kedua pasal tersebut intinya memberikan wewenang Pengawas sangat besar yang melebihi wewenang rapat anggota sebagai perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Wewenang pengurus untuk memberhentikan pengurus sementara adalah sama dengan wewenang Dewan Komisaris untuk memberhentikan sementara anggota direksi sebagaimana ditentukan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
6. Bahwa Bab VII yang mengatur Modal Koperasi dalam Undang-Undang 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena skema modal koperasi yang terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal adalah bertentangan dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan usaha bersama. Selain itu, setoran pokok yang dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota tidak dapat dikembalikan dan Sertifikat Modal Koperasi tidak dapat ditarik dan hanya dapat dijual pada sesama anggota atau calon anggota atau ditalangi maksimal 20% dari surplus hasil usaha koperasi tahun buku berjalan adalah bentuk perampasan secara sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun

1945. Modal koperasi sebagaimana diatur dalam Bab VII telah membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan karena tidak ada pembatasan proporsi dana dari pihak luar dan ketentuan yang menjamin otonomi koperasi. Revitalisasi semacam ini tidak sesuai dengan prinsip koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang menolong diri sendiri dengan usaha bersama yang dikendalikan anggotanya. Terlebih lagi ketentuan tentang modal penyertaan tersebut juga membuka peluang itikad tidak baik berbagai pihak berupa “money laundering” bisa dilakukan dengan leluasa dilembaga koperasi karena tidak adanya pembatasan yang jelas.

7. Bahwa Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pelarangan koperasi membagikan kepada anggota surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota sungguh tidak sesuai dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan usaha bersama dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bangunan perusahaannya adalah koperasi.
8. Bahwa Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ketentuan tersebut telah menyimpang dari hakikat/ciri badan hukum sebab apabila ada kerugian maka ganti ruginya tidak sebatas pada kekayaan perusahaan. Padahal, menurut prinsip Schulze, tanggung jawab anggota koperasi adalah terbatas.
9. Bahwa Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena penentuan jenis koperasi sebatas pada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam merupakan bentuk pembatasan usaha koperasi. Undang-Undang yang mengatur Perseroan Terbatas saja tidak membatasi jenis usaha Perseroan Terbatas dan setiap satu Perseroan Terbatas harus satu jenis usaha. Ketentuan juga a quo mengikis dan mengubah haikat usaha koperasi tidak lagi bertumpu atau berdasarkan kebutuhan anggota koperasi. Selain itu, ketentuan Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menghilangkan hak koperasi sebagai wadah usaha bersama berdasarkan kekeluargaan otonom dan mandiri untuk mengembangkan usahanya.

Dalam Amar Putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan:<sup>5</sup>

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Op Cit*, hal 254.



Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian?
2. Bagaimanakah status pengurus koperasi yang bukan berasal dari anggota koperasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian?
3. Bagaimanakah pengaturan perkoperasian di Indonesia?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
2. Untuk mengetahui status pengurus koperasi yang bukan berasal dari anggota koperasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
3. Untuk mengetahui pengaturan perkoperasian di Indonesia

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, berupa perundang-undangan yang berhubungan dengan perkoperasian

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>7</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara harfiah koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Kedua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang berarti bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama.<sup>8</sup>

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi.<sup>9</sup> Ciri utama koperasi adalah kerjasama ekonomi antar anggota. Kerjasama inilah yang merupakan cikal bakal koperasi ekonomi, yang dikenal

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ibid, hal.25

<sup>8</sup> Kamaralsyah, DH. SKK, *Pancawindu Gerakan Koperasi (1947-1987)*, Cetakan I, (Jakarta: Dekopin, 1987), hal.190

<sup>9</sup> Asnawi Hasan, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1987), hal.158

dengan istilah koperasi. Kerjasama pada dasarnya bertujuan mempertahankan diri akan tindakan yang berasal dari luar, dengan menarik manfaat sebesar-besarnya dari suasana hidup berkumpul.<sup>10</sup>

Susunan kelembagaan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan sejak reformasi konstitusi antara tahun 1999 sampai dengan 2002. Perubahan signifikan itu terjadi karena semakin banyaknya kebutuhan negara berkaitan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut dibentuklah lembaga-lembaga baru, salah satunya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi diberikan peran sebagai pengawal dan penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”, sebab Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Ada empat kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012 merupakan salah satu produk undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Putusan hakim konstitusi yang menyidangkan uji materi undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-

---

<sup>10</sup> Majelis Pendidikan Koperasi Indonesia, *Dasar Pengembangan Koperasi Indonesia*, (Jakarta: DEKOPIN, 1990), hal.4-5

Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dibatalkan dan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai landasan hukum perkoperasian di Indonesia untuk sementara waktu sampai Undang-Undang baru dibuat dan disahkan oleh pembentuk Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak berlaku surut tetapi berlaku sejak tanggal putusan yakni tanggal 28 Mei 2014, sehingga akta notaris mengenai pendirian dan/atau perubahan koperasi yang dibuat antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 tetap sah dan mengikat dikarenakan adanya Asas Praduga Sah yang menyatakan bahwa semua akta notaris sah dan mengikat selama sepanjang dibuat berdasarkan ketentuan (aturan hukum) yang berlaku pada saat itu.<sup>11</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak berlaku surut tetapi berlaku sejak tanggal putusan yakni tanggal 28 Mei 2014, sehingga akta notaris mengenai pendirian dan/atau perubahan koperasi yang dibuat antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 tetap sah dan mengikat dikarenakan adanya Asas Praduga Sah yang menyatakan bahwa semua akta notaris sah dan mengikat selama sepanjang dibuat berdasarkan ketentuan (aturan hukum) yang berlaku pada saat itu.<sup>12</sup>

Dalam sistem manajemen koperasi, anggota sebagai pemilik koperasi tidak mungkin dapat melaksanakan pengelolaan koperasi secara sendiri, sehingga rencana membentuk pengurus adalah hal tepat untuk memperoleh hasil efektif yang diperuntukkan kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada

---

<sup>11</sup> Seminar Penyegaran Pengetahuan Mengenai Perkoperasian Dan Konsultasi Perpajakan Bagi Profesi Notaris, yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara pada tanggal 17 November 2014, di Medan.

<sup>12</sup> Seminar Penyegaran Pengetahuan Mengenai Perkoperasian Dan Konsultasi Perpajakan Bagi Profesi Notaris, yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara pada tanggal 17 November 2014, di Medan.

umumnya. Pengurus adalah wakil anggota yang akan mengelola usaha koperasi. Pengurus dapat dimaknai sebagai wakil anggota yang akan menjalankan kegiatan koperasi dengan mengemban tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Pengurus diberikan mandat oleh anggota dalam waktu tertentu untuk mengelola koperasi dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya dan/atau dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir oleh anggota melalui Rapat Anggota jika dianggap tidak mampu mengelola koperasi dengan baik dan tidak bertanggung jawab.

Pengurus dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya diberikan kesempatan oleh hukum untuk mengangkat pengelola yang dijadikan *partner* untuk menjalankan dan melaksanakan hasil rapat anggota koperasi. Pengelola yang dimaksud merupakan manajer yang memiliki keahlian khusus dan mempunyai kecakapan serta kemampuan di bidang usaha perkoperasian untuk memimpin usaha koperasi dengan cara mengkoordinir seluruh karyawan yang melaksanakan usaha tersebut.

Pengangkatan pengurus yang bukan berasal dari anggota hanya bersifat temporer. Keterpaksaan mengangkat pengurus dari non-anggota masih diizinkan asal jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan jumlah pengurus. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi alasan hakim Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan dan dijadikan dasar dalam pengangkatan dan diberikannya gaji serta tunjangan kepada pengurus koperasi di Undang-Undang 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mempertahankan ciri khasnya yakni perkumpulan orang-orang yang memiliki keadaan ekonomi lemah untuk bersatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan yang terjadi di koperasi pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah pada diri pengurus yang berimbas pada koperasi dan kurang percayanya anggota masyarakat kepada koperasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dianggap mampu menjawab tantangan globalisasi yang akan dihadapi oleh pelaku usaha Indonesia. Upaya penguatan koperasi dapat dilihat dengan semakin bertambahnya pasal-pasal yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian masih diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Selain itu, ada beberapa pasal yang disempurnakan dan ditambahkan oleh pemerintah untuk menyatakan bahwa koperasi dapat menjadi tiang perekonomian Indonesia.

Mahkamah memutuskan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.<sup>13</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka setiap koperasi yang berdiri dan/atau yang telah melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian harus melakukan penyesuaian kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kesempatan kembali kepada koperasi-koperasi Indonesia untuk berinovasi dan melakukan beberapa jenis usaha dalam pengembangan dan pemberian manfaat kepada anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

Langkah yang diambil pemerintah untuk menguatkan koperasi dengan disahkannya Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 adalah tepat. Permasalahan yang terjadi adalah Undang-Undang tersebut kurang bersahabat dan mereduksi makna koperasi yang luhur. Memperkuat koperasi bukan berarti mengubah filosofis koperasi, bukan mengubah kewenangan pembina, bukan mengharuskan satu koperasi melaksanakan satu jenis koperasi, bukan harus membeli sertifikat modal koperasi oleh anggota, bukan tidak membagi sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi kepada anggota jika hal itu diperoleh bukan dari non anggota.

Dasar bagi Undang-Undang Perkoperasian yang akan datang adalah Pancasila dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun asas perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **Kesimpulan**

1. Akibat dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasi, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dijadikan landasan hukum perkoperasian untuk sementara

waktu. Koperasi yang didirikan dan/atau yang telah melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian harus melakukan penyesuaian anggaran dasar kembali terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Tidak ada batas waktu dan sanksi yang diberikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi bagi koperasi-koperasi yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

2. Status pengurus koperasi yang bukan dari anggota koperasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 ditentukan oleh Rapat Anggota. Meskipun di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa pengurus berasal dari dan untuk anggota tetapi jika di satu koperasi kursi anggota pengurus masih kosong, maka tidak menjadi diskurs penting ketika non-anggota menduduki jabatan anggota pengurus tersebut asalkan kuotanya tidak lebih sepertiga dari pengurus yang berasal dari anggota.
3. Pengaturan koperasi di Indonesia harus mampu mengembangkan kemampuan anggota, tidak menyamakan koperasi dengan badan usaha lainnya serta menjadikan Pancasila sebagai falsafah koperasi Indonesia sebagaimana falsafah negara Republik Indonesia.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus benar-benar membuat suatu aturan yang berpihak kepada koperasi dan untuk kemajuan koperasi, bukan untuk kepentingan pemerintah semata.



2. Anggota koperasi harus dijadikan tiang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga nantinya di masa mendatang anggota koperasi dapat diangkat dan dijadikan anggota pengurus koperasi.
3. Penguatan internal, pengembalian koperasi pada jati dirinya dan menjadikan Pancasila sebagai landasan koperasi diharapkan mampu mengangkat dan mengajak lapisan anggota masyarakat sebagai anggota koperasi sehingga dengan begitu, koperasi mampu bersaing dengan badan usaha lainnya yang berfokus pada keuntungan.

## V. Daftar Pustaka

[Apriliazala.blogspot.com/2014/06/kenapa-undang-undang-koperasi.html?m=1](http://Apriliazala.blogspot.com/2014/06/kenapa-undang-undang-koperasi.html?m=1),  
Aprilia Eka Putri, Alasan Undang-Undang Koperasi Dibatalkan, diakses  
pada tanggal 02 Maret 2015.

DH, Kamaralsyah, SKK, *Pancawindu Gerakan Koperasi (1947-1987)* Cetakan I.  
Jakarta: 1987.

Hasan, Asnawi, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi  
Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem  
Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI Press, 1987.

Majelis Pendidikan Koperasi Indonesia, *Dasar Pengembangan Koperasi  
Indonesia*. Jakarta: DEKOPIN. 1990.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diunduh dari laman:  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

Seminar Penyegaran Pengetahuan Mengenai Perkoperasian Dan Konsultasi  
Perpajakan Bagi Profesi Notaris, yang diselenggarakan oleh Pengurus  
Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara pada tanggal 17  
November 2014, di Medan.

Seminar Penyegaran Pengetahuan Mengenai Perkoperasian Dan Konsultasi  
Perpajakan Bagi Profesi Notaris, yang diselenggarakan oleh Pengurus  
Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara pada tanggal 17  
November 2014, di Medan.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.